

2026



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

POLICY BRIEF

PEDESAAN PAPUA

Sumber Kemiskinan Tinggi dengan Harapan Ekonomi Masa Depan

EXECUTIVE SUMMARY

Pertumbuhan ekonomi Papua cenderung melesit positif (BPS Papua, 2023a) seolah menggambarkan kehidupan masyarakat Papua tanpa masalah. Padahal sebagai bagian dari sektor primer tumpuan ekonomi, pertanian di Papua masih menghadapi permasalahan dengan berbagai faktor seperti akses terbatas pada infrastruktur dan teknologi, kapasitas SDM yang rendah, belum tersedia rantai pasok hasil pertanian yang memadai, dan kurangnya jumlah PNS penyuluh pertanian. Masalah ini penting karena berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan masyarakat, stagnasi pendapatan petani, dan potensi peningkatan kerentanan sosial di wilayah Papua secara keseluruhan. Policy brief ini bertujuan memberikan solusi untuk mengoptimalkan sektor pertanian di Papua melalui peningkatan produktivitas, modernisasi, dan penguatan rantai pasok hasil pertanian. Alternatif kebijakan yang ditawarkan meliputi penyediaan pupuk dan peralatan pertanian modern, penyediaan rantai pasok hasil tani yang memadai, dan penambahan PNS penyuluh pertanian. Implementasi kebijakan ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, khususnya Kementerian Pertanian, Bappenas, Kemkominfo, dan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama di lapangan.

Disusun Oleh :
Windy Army Iriyanti
24/536369/PSP/08310
windyarmyiriyanti@mail.ugm.ac.id

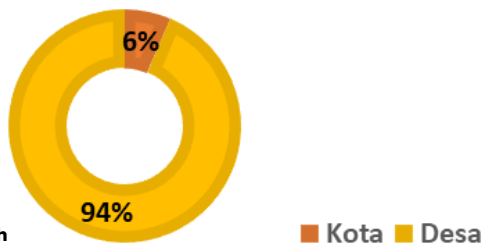
PENDAHULUAN



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Di balik pertumbuhan ekonomi Papua yang cenderung positif, sektor pertanian adalah sektor dengan kontribusi terbesar terhadap tumpuan ekonomi Papua hingga pertengahan 2016 dan menjadi sumber ekonomi kedua hingga tahun 2024, jika sektor tambang dikeluarkan (BPS Papua, 2023a). Sayangnya, sektor penopang roda perekonomian ini diisi oleh para pekerja dengan kualitas hidup yang paling rendah

SEBARAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROVINSI PAPUA TAHUN 2022

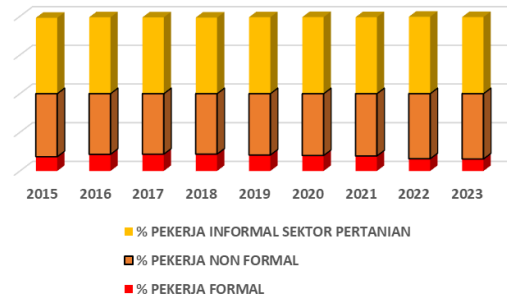


Sumber: Data BPS, diolah

■ Kota ■ Desa

Sekitar 75% wilayah Papua tertutupi oleh hutan lebat, yang didominasi oleh wilayah pedesaan (Kumaran, 2024). Dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat Papua hingga kini masih bergantung pada alam dan hasil bumi. Seperti pada gambar diagram di atas, menurut data BPS, 94% penduduk miskin di Papua berada di wilayah pedesaan (BPS Papua, 2023b). Selain itu, pada grafik di samping, sebagian besar penduduk Papua bekerja pada sektor informal pertanian. Namun, ketergantungan pada sektor ini tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan modernisasi sektor pertanian. Di lain sisi, buruknya infrastruktur dan teknologi, serta transportasi yang mahal sangat menghambat produktivitas pertanian. Akses distribusi hasil pertanian juga terbatas, sehingga memperlambat perputaran ekonomi pertanian (Fenetiruma et al., 2022). Berdasarkan data Sensus Pertanian (ST) 2023, total jumlah usaha tani di Provinsi Papua adalah sebanyak 568.059, di mana rumah tangga pertaniannya ada sebanyak 300.271, naik hampir 29% dari ST tahun 2013. Hal ini berarti semakin banyak pekerja yang berprofesi sebagai petani di Provinsi Papua dari tahun ke tahun (ST BPS Papua, 2023).

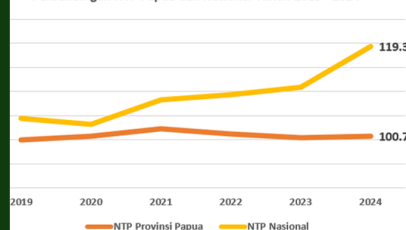
Persentase Pekerja per Sektor Provinsi Papua Tahun 2015 - 2023



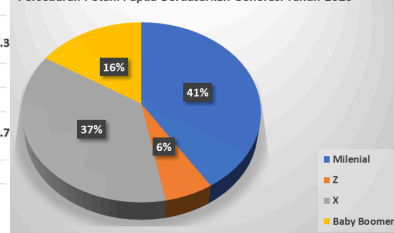
Sumber: Data BPS, diolah

Salah satu indikator kesejahteraan petani adalah indeks nilai tukar petani (NTP). Dari tahun 2019 hingga 2024, NTP Papua relatif stagnan dan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan NTP nasional. Hal ini mengindikasikan rendahnya daya beli petani dan mengisyaratkan bahwa petani Papua masih belum "sejahtera". Selain itu, data ST 2023 menunjukkan bahwa meskipun jumlah unit usaha pertanian meningkat secara signifikan, penggunaan teknologi modern dalam pertanian masih sangat rendah, yakni sekitar 6,77%, padahal tenaga kerja pertanian didominasi oleh petani Gen X yang cenderung bersemangat dengan teknologi. Masalah rendahnya kesejahteraan petani Papua ini memiliki berbagai dampak, mulai dari rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan masyarakat, lemahnya kesejahteraan masyarakat, hingga meningkatnya potensi kriminalitas sebagai akibat tekanan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga struktural dan kontekstual sesuai dengan karakteristik Papua

Perbandingan NTP Papua dan Nasional Tahun 2019 - 2024



Persebaran Petani Papua Berdasarkan Generasi Tahun 2023



Sumber: Data BPS, diolah

IDENTIFIKASI MASALAH



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pertanian Tradisional - Tanpa Teknologi

Hampir seluruh petani di Papua masih bertani dengan cara tradisional dan belum memanfaatkan bantuan teknologi, sehingga produktivitasnya tidak maksimal dan pendapatan petani hanya cukup untuk kebutuhan hidup harian. Menurut data BPS, penggunaan teknologi modern masih sangat sedikit. Daerah pengguna teknologi modern yang tertinggi adalah Kota Jayapura 7% dan Merauke 24%, sedangkan di daerah pegunungan yang didominasi oleh wilayah pedesaan, angkanya masih di bawah 1% (ST BPS Papua, 2023).

Rendahnya Kapasitas SDM Pertanian

Berdasarkan data sebaran persentase pekerja formal dan informal BPS pada tahun 2023, jumlah penduduk Papua yang bekerja pada sektor formal hanya sebesar 15,57% , sedangkan sisanya masuk pada kategori informal, di mana dari total pekerja informal tersebut, sebanyak 99,06% bekerja pada sektor informal bidang pertanian. Data mengungkap bahwa hal ini konsisten terjadi sejak lama dan belum ada tindak lanjut yang terarah dalam penanganannya. Di lain sisi, hasil ST BPS 2023 menyatakan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian tercatat meningkat 49% dibandingkan dengan hasil ST tahun 2013. Namun, penggunaan teknologi modern hanya sekitar 6,77% yang didominasi oleh daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan rendahnya kompetensi petani di pedesaan Papua.

Rantai Pasok Hasil Tani Belum Memadai

Persebaran pertanian di Papua, baik di desa maupun di perkotaan, dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang khas di wilayah tersebut. Indikator transportasi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pegunungan di Provinsi Papua ditempuh dengan pesawat terbang. Walaupun beberapa daerah dapat dilalui dengan mobil roda empat, namun membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk sampai di tempat tujuan. Supply chain menjadi hal krusial dalam keberhasilan suatu usaha. Banyak desa di Papua yang tidak memiliki akses jalan maupun transportasi yang memadai, sehingga distribusi hasil panen sering kali gagal. Banyak hasil tani yang akhirnya terbuang karena tidak adanya alur distribusi hasil pertanian yang jelas, yang menghambat perputaran ekonomi pertanian di Papua.

PNS Penyuluh Pertanian Tidak Tersedia di Seluruh Desa Pertanian

Beberapa kebijakan terkait sektor pertanian telah diterbitkan dan diimplementasikan di Provinsi Papua. Salah satunya adalah penyediaan tenaga penyuluh pertanian yang diatur dalam Perpres No.35 Tahun 2022 tentang penguatan fungsi penyuluh pertanian yang menekankan Prioritas Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian melalui penyediaan dan penyebarluasan materi penyuluh pertanian dan juga peningkatan kemudahan akses petani dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lain untuk mengembangkan usahanya (Kementan, 2023). Namun, hal ini berbeda dengan realita di lapangan. Jumlah penyuluh pertanian masih sangat kurang dan akses ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lain juga masih sangat sulit dijangkau bagi petani. Berdasarkan data Pemprov Papua, dari total 7.578 kelompok tani, hanya ada sebanyak 13,5% tenaga penyuluh pertaniannya, dengan kata lain sebanyak 86,5% jumlah tenaga penyuluh pertanian tidak tersedia (Indahyani & La, 2023). Selain itu terdapat Permentan No.82 Tahun 2013 tentang pedoman pembinaan poktan & gapoktan termasuk dalam penggunaan teknologi, namun kurangnya penyuluh membuat hal tersebut semakin mustahil.



Permasalahan kemiskinan tinggi di pedesaan Papua memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, kontekstual, dan berbasis wilayah. Upaya penanganan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan bantuan sosial, tetapi harus diarahkan pada transformasi struktural sektor ekonomi utama masyarakat, khususnya pertanian, serta peningkatan akses terhadap infrastruktur dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang melibatkan pemerintah pusat seperti Kementan, Bappenas, dan Kemkominfo, serta Pemda melalui Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan Dinas Kominfo secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem penyuluhan pertanian berbasis wilayah sebagai instrumen utama peningkatan kapasitas petani. Kementan bersama Dinas Pertanian Pemprov dan Pemkab/kot bertanggung jawab atas penambahan jumlah tenaga penyuluh melalui skema afirmatif untuk wilayah pedalaman, serta distribusi yang lebih merata sesuai kebutuhan distrik. Selain itu, penyuluh perlu bekerja sama dengan pemerintah kampung dan tokoh adat untuk memastikan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal. Model penyuluhan berbasis *mobile* dan *digital* dapat difasilitasi oleh Diskominfo untuk menjangkau wilayah terpencil. Dengan demikian, petani tidak hanya mendapatkan akses informasi, tetapi juga pendampingan yang berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas.

Kedua, pemerintah perlu mendorong digitalisasi sektor pertanian melalui program *Papua Smart Farming*. Kemkominfo bersama Diskominfo Provinsi Papua bertanggung jawab dalam memperluas jaringan internet di wilayah *blank spot* melalui teknologi satelit dan BTS. Sementara itu, Kementan dan Dinas Pertanian daerah mengembangkan platform informasi pertanian serta memberikan pelatihan literasi digital kepada petani, khususnya generasi muda, agar mampu mengakses informasi harga, cuaca, dan teknologi secara *real time* guna meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Ketiga, pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan harus menjadi prioritas utama. KemenPUPR bersama DisPUPR daerah bertanggung jawab atas pembangunan jalan produksi, akses transportasi, serta fasilitas distribusi hasil pertanian di wilayah pedalaman. Bappenas berperan dalam perencanaan dan penganggaran program strategis ini agar tepat sasaran. Selain itu, Pemda melalui Disnaker dapat mengintegrasikan program padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.

Keempat, revitalisasi kelembagaan poktan dan gapoktan perlu dilakukan untuk memperkuat posisi tawar petani dalam rantai nilai ekonomi. Dinas Pertanian bersama Dinas Koperasi dan UMKM bertanggung jawab atas penguatan poktan berbasis komoditas unggulan lokal serta pemberian insentif berbasis kinerja. Kemitraan dengan sektor swasta dapat difasilitasi oleh Disperindag untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Kelima, diversifikasi ekonomi lokal perlu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Dinashut, DiskopUMKM, serta Disperindag bertanggung jawab atas pengembangan usaha berbasis hasil hutan nonkayu, UMKM lokal, dan koperasi desa. Dukungan akses pembiayaan dapat difasilitasi oleh Pemda bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan.

Dengan demikian, sinergi pemerintah dan masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua. Pendekatan yang terarah, adaptif, dan berbasis kebutuhan lokal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani Papua.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

REFERENSI

- BPS Papua. (2023b). Rilis Berita Resmi Statistik Bps Provinsi Papua Januari 2023
- Fenetiruma, O. A., Hutabarat, M., Palinggi, Y., Sumule, A., & ... (2022). Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Papua
- Indahyani, R., & La, M. (2023). Alternatif kebijakan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 21(1), 111-131.
<http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.111-131>
- Kementan. (2023). Data Statistik SDM Penyuluhan Pertanian 2023.
- Kumparan. (2024). Kondisi Geografis Pulau Papua. *Kumparan.Id*.
- ST BPS Papua. (2023). Hasil pencacahan lengkap

